



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MATARAM

Jalan Kokoq Segara Nomor 06, Kel. Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Mataram (83116)
Laman : bapasmataram.kemenkumham.go.id Surel : bapasmataram@kemenkumham.go.id

30 Januari 2024

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Nusa Tenggara Barat
di tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR : W.21.PAS.PAS.10-KU.03.01-281

No.	Naskah Dinas Yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram	1 (Satu) berkas	Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pengirim
Kepala Balai Pemasyarakatan
Kelas II Mataram



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Muhtaruddin
NIP 19704051994031001

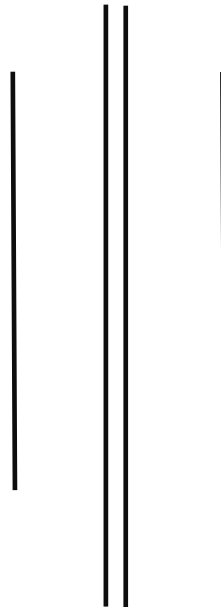
LKJIP BAPAS MATARAM TAHUN 2023



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MATARAM

TAHUN 2023



PROFESIONAL | AKUNTABEL | SINERGI | TRANSPARAN | INOVATIF

LKJIP BAPAS MATARAM TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram Laporan yang memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi instansi selama periode januari sampai dengan desember 2023. Penyusunan LKjIP berupaya menggambarkan hasil kinerja yang dicapai Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram disusun sesuai dengan Pedoman yang diatur dalam PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Indonesia dan Kepmenkumham nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram tahun 2023 memuat kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan. Hal tersebut tentunya semakin meningkatkan kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram menjadi semakin Akuntabel sesuai sistem tata nilai “Kami PASTI”.

Akhirnya demikian laporan ini kami susun, semoga mampu dipahami dengan baik dan memberikan kemanfaatan terbaik bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kepala Balai Pemasarakatan

Kelas II Mataram



Muhtaruddin

NIP 19704051994031001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan melaksanakan tugas utama yaitu melaksanakan pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan klien pemasyarakatan serta pembuatan penelitian kemasyarakatan. Sesuai dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, capaian target kinerja tahun 2023 pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram pada tahun 2023 adalah sebagai berikut;

Tabel data perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dan 2023

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga	50%	62%	124%	60%	85%	141%
2.	Persentase menurunnya Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	60%	30%	200 %	55%	24%	229%
3.	Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	30%	100 %	333%	35%	100 %	285%
4.	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layan	1 Layan	100 %	1 Layan	1 Layan	100 %
5.	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layan	1 Layan	100 %	1 Layan	1 Layan	100 %
6.	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi	1 Layan	1 Layan	100 %	1 Layan	1 Layan	100 %

	pegawai pemasyarakatan	nan	nan		nan	nan	
7.	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Laya nan	1 Laya nan	100 %	1 Laya nan	1 Laya nan	100 %
8.	Jumlah layanan perkantoran	1 laya nan	1 Laya nan	100 %	1 laya nan	1 Laya nan	100 %
9.	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	29 Unit	29 Unit	100 %	54 Unit	54 Unit	100 %
10.	Jumlah Gedung dan Bangunan	0 Unit	0 Unit	0	1 Unit	1 Unit	100 %

Tahun Anggaran 2023 dialokasikan Anggaran Sebesar Rp 5.286.757.000,- (Lima milyar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh riburupiah). Sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 capaian realisasi anggaran sebesar 99%.

Tabel data realisasi anggaran per jenis belanja

NO	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI
1	Belanja Pegawai	Rp 3.601.475.000	Rp 3.560.767.199	98.87%
2	Belanja Barang	Rp 1.405.885.000	Rp 1.398.328.950	99.81%
3	Belanja Modal	Rp. 279.397.000	Rp 274.700.000	98.32%
T O T A L		Rp. 5.286.757.000	Rp. 5.233.796.149	99,00%

Tabel data perbandingan realisasi anggaran YoY

Tahun 2022			Tahun 2023		
Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Rp. 5.838.410.000	Rp. 5.818.514.743	99,66%	Rp. 5.286.757.000	Rp. 5.233.796.149	99,00%

Mengukur kualitas dari kinerja penganggaran pada tiap tahap kegiatan antara lain perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan digunakan aplikasi IKPA dan SMART. Capaian kinerja anggaran pada satuan kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut;

Gb. Screenshot aplikasi smart Balai Pemasarakatan Mataram TA.2023



Nilai Penyerapan 99, Konsistensi sebesar 99,75, Capaian Realisasi Output sebesar 100 , Efisiensi sebesar 20 dan Nilai Efisiensi sebesar 100. Nilai Akhir 99,86 (Sangat Baik).

Gb. Screenshot aplikasi IKPA Balai Pemasarakatan Mataram TA.2023

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN MATARAM

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sebagai Ditjen : DEBENSE:

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Subkef	Unit/Instansi	Kategori	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Kategori	Nilai Akhir (Nilai Total/Kategori)
						Realisasi DIPA	Deviasi Halusness III DIPA	Penyerapan Anggaran	Saldo Kontraktual	Pertyesian Tagihan	Pengalokasian UP dan TUP	Diseraskan SPN	Capaian Output				
1	030	013	407007	BALAI PEMASYARAKATAN MATARAM	Nilai	100.00	48.51	100.00	0.00	0.00	97.90	100.00	100.00	78.90	80%	64.20	
					Selisi	10	10	-20	0	0	10	-5	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.90	20.00	0.00	0.00	9.70	-5.00	25.00				
					Nilai Akhir	94.01			99.20			100.00					

Nilai aspek kualitas perencanaan anggaran 94,01, nilai aspek kualitas pelaksanaan anggaran 99,20 dan nilai aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran 100 dengan nilai akhir 98,20.

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	3
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
DAFTAR ISI	7
BAB I PENDAHULUAN	8
Latar Belakang	8
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
Maksud dan Tujuan	13
Aspek Strategis	13
Isu Strategis	18
Sistematika Pelaporan	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
Rencana Strategis	22
Perjanjian Kinerja	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
Capaian Kinerja	30
Capaian realisasi Anggaran	77
Capaian Kinerja Anggaran	81
Capaian Kinerja Lainnya	83
BAB IV PENUTUP	85
Kesimpulan	85
Saran dan tindak lanjut	86
LAMPIRAN	87

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang baru menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang lama. UU Pemasyarakatan yang baru ini semakin memperkuat posisi Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum. Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pascaadjudikasi. Undang-Undang ini disamping memperkuat konsep reintegrasi sosial juga memperkuat konsep keadilan restoratif yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan pembaruan hukum pidana nasional Indonesia (KUHP). Dengan demikian Pemasyarakatan tidak lagi hanya pada tahap akhir dari bekerjanya sistem peradilan pidana namun sudah bekerja sejak dimulainya proses peradilan pidana.

Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah institusi yang sangat erat hubungannya dengan penegakan hukum di Indonesia. Sebagai Instansi Pemerintah di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Balai Pemasyarakatan melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Bidang Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan melaksanakan tugas utama yaitu melaksanakan Pembimbingan Kemasyarakatan, melaksanakan Pendampingan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dan Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas

Pemasyarakatan yang melaksanakan Litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Disamping Pelaksanaan tugas dan fungsi teknis di Balai Pemasyarakatan juga dilaksanakan tugas dan fungsi Ketatausahaan.

Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram berdiri pada tanggal 31 Oktober 1981 yang terletak di jalan Majapahit No. 44 Mataram, selanjutnya Memiliki Gedung baru yang diresmikan pada tanggal 12 Februari 2009 terletak di jalan Kokok Segara No. 06 Mataram. Luas Bangunan saat ini sekitar 1.500 m² dan terdiri dari 9 unit gedung bangunan dan 2 unit rumah dinas negara yang berdiri di atas tanah milik Bapas Mataram dengan luas 2.206m².

Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram mempunyai wilayah kerja se-Pulau Lombok dan pulau kecil sekitarnya dengan luas Wilayah kerja 4.738,65 km² meliputi daratan utama dan kepulauan. Menurut Data Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, di Pulau Lombok Jumlah Kabupaten/Kota adalah 5 Kabupaten/Kota, jumlah Kecamatan 53 Kecamatan dan jumlah Desa/Kelurahan adalah 598 Desa/Kelurahan. Di Pulau Lombok Sendiri jumlah Satuan Kerja Pemasyarakatan (Lapas/Rutan/LPKA) yaitu 6 Satuan Kerja.

Kondisi Geografis Wilayah Kerja Bapas Mataram terdiri dari Dataran rendah, dataran tinggi, Lautan, Danau/Bendungan, Sungai dan Rawa-rawa. Bentang alam tertinggi di Nusa Tenggara Barat terletak di Gunung Rinjani yakni 3.726 mdpl. Selong adalah kota kabupaten yang mempunyai ketinggian paling tinggi yaitu 166 mdpl, sementara Kota Mataram sebagai Ibukota Provinsi NTB memiliki ketinggian 27 mdpl.

Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram merupakan Instansi Pemerintah yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menggunakan Anggaran yang bersumber dari APBN setiap tahunnya. Sebagai bentuk akuntabilitas dan sarana pengukuran Kinerja, pada tahun anggaran 2023 Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram

Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sesuai dengan petunjuk-petunjuk Penyusunan LKJIP yang sesuai PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Kepmenkumham nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dasar hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram tahun 2023 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2023 tentang Pemasarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah;
5. Kepmenkumham nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat nomor W.21-PR.04.01 – 1814 tanggal 2 Mei 2023

TUGAS DAN FUNGSI

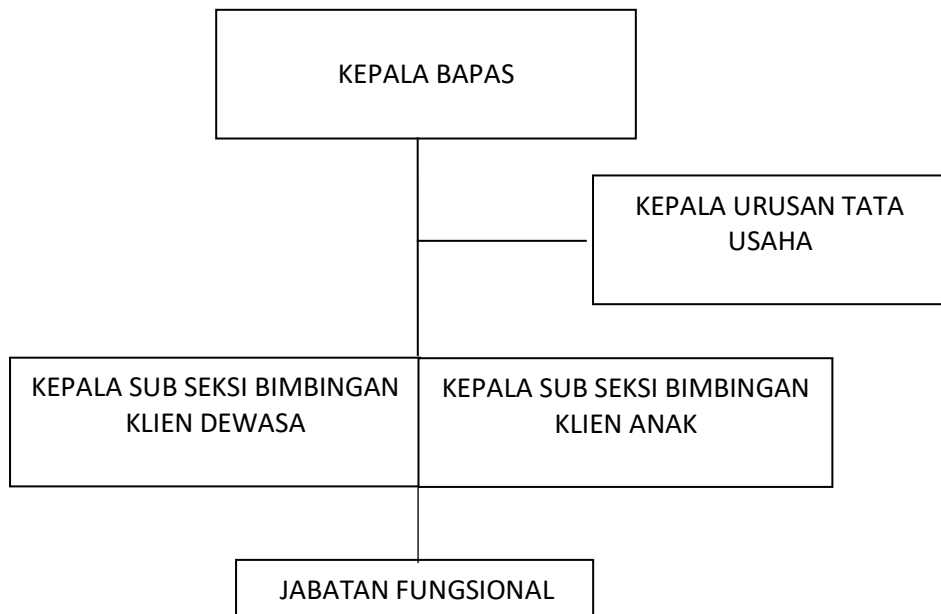
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2023 tentang Pemasarakatan, dalam pelaksanaannya Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang- undangan. Balai Pemasarakatan Kelas II

Mataram mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan meliputi Pendampingan, Pembimbingan dan Pengawasan;
- b. Menyelenggarakan Penelitian Kemasyarakatan;
- c. Membimbing, membantu dan mengawasi Warga Binaan Pemasyarakatan yang memperoleh Assimilasi ataupun Integrasi Sosial (Pembinaan Luar Lembaga), baik Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas;
- d. Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan Putusan Pengadilan dijatuhi Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, Pidana Denda, diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti Wajib Latihan Kerja atau Anak yang memperoleh Assimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, maupun Cuti Menjelang Bebas dari Lembaga Pemasyarakatan;
- e. Mengadakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dan mengikuti Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lapas / Rutan, guna penentuan program Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- f. Membuat Laporan dan Dokumentasi secara berkala kepada Pejabat atasan dan kepada instansi atau pihak yang berkepentingan;
- g. Meminimalkan penjatuhan pidana pada anak dengan jalan menyarankan dalam Penelitian Kemasyarakatan, baik kepada Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim;
- h. Menyelenggarakan Ketatausahaan Bapas;

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Struktur Organisasi Balai Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram sebagai berikut :

Gb. Struktur organisasi Balai Pemasarakatan Mataram TA.2023



Jumlah pegawai Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram sampai dengan periode laporan ini adalah sebanyak 51 pegawai, yang terdiri dari 4 orang yang menduduki Jabatan Struktural, 33 orang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu dan 15 orang menduduki Jabatan Fungsional Umum. Berdasarkan jenis kelamin pegawai terdiri dari 35 orang pria dan 17 orang wanita.

Tabel 1 : Keadaan pegawai Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin Per 31 Desember 2023 :

Gol III				Gol II				Jlh.	Jenis Kelamin		Jlh.
a	b	c	d	a	b	c	d	Jumlah	L	P	Jumlah
8	17	5	10	1	4	3	3	51	34	17	51

Tabel 2 : Keadaan pegawai Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram

No	Satker	Jabatan Struktura I		Jabatan Fungsional Tertentu						JFU	Jumlah
		Es. IV	Es. V	PK Madya	PK Muda	PK Pertama	APK Penye-lia	APK Mahir	APK Tera-mpil		
1	Bapas Kelas II Mataram	1	3	0	7	16	2	3	4	15	51

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) satuan kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan gambaran secara singkat dan jelas tentang Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram tahun 2023.
- b. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Bapas Kelas II Mataram atas penggunaan Anggaran
- c. Melakukan pengukuran Kinerja, Keberhasilan atau kegagalan Pelaksanaan Kegiatan Sesuai dengan perencanaan atau sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.
- d. Melakukan evaluasi terhadap Kinerja instansi Bapas Kelas II Mataram.
- e. Melakukan Perbaikan dan Penyempurnaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka Peningkatan Kinerja di Tahun Mendatang.

ASPEK STRATEGIS

Balai Pemasarakatan (Bapas) adalah institusi yang sangat erat hubungannya dengan penegakan hukum di Indonesia. Pembaruan Undang Undang Pemasarakatan semakin memperkuat posisi

Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu antar Aparat Penegak Hukum yang semakin menjadikan peran Balai Pemasyarakatan menjadi sangat Penting begitu pula dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Berikut ini beberapa Aspek Strategis yang menjadikan pentingnya keberadaan Balai Pemasyarakatan (Mataram) dalam penyelenggaraan Pemerintahan;

a. Peran Strategis Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing Kemasyarakatan merupakan salah satu Pejabat Fungsional Tertentu di lingkungan Kementerian Hukum Dan HAM RI. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi No. 22 Tahun 2016, Pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan ialah Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang pembimbingan kemasyarakatan. Berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 2023 tentang Pemasyarakatan, Penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan meliputi Pendampingan, Pembimbingan dan Pengawasan;

1. Pendampingan dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan dan perlindungan hak dalam proses peradilan sejak tahap praadjudikasi sampai dengan tahap pascaadjudikasi dan bimbingan lanjutan.
2. Pembimbingan dimaksudkan untuk memberikan bekal dalam meningkatkan kualitas mental dan spiritual, intelektual, keterampilan, dan kemandirian bagi Klien.
3. Pengawasan dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan syarat dan program yang telah ditetapkan.

Penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan dilakukan melalui tahapan Penerimaan Klien, Pemberian Program, dan Pengakhiran. Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk kepentingan Pelayanan Tahanan atau Anak, Pembinaan Narapidana

atau Anak Binaan, dan Pembimbingan Kemasyarakatan Klien, serta sebagai dasar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penyelesaian perkara. Hasil Penelitian (LITMAS) Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas) merupakan Instrumen penting dan menjadi dasar dalam Penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan meliputi Pendampingan, Pembimbingan dan Pengawasan.

b. Pembimbingan Klien Pemasarakatan.

Berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 2023 tentang Pemasarakatan, Pemasarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pascaadjudikasi. Undang-Undang ini disamping memperkuat konsep reintegrasi sosial juga memperkuat konsep keadilan restoratif yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan pembaruan hukum pidana nasional Indonesia (KUHP). Pembimbingan Pemasarakatan diatur dalam Bagian Keempat (Pasal 55-Pasal 59) dari Undang-Undang ini

Pembimbingan Kemasyarakatan meliputi Pendampingan, Pembimbingan dan Pengawasan kepada Klien Pemasarakatan. Klien Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak. Pembimbingan merupakan pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani klien Pemasarakatan guna mendukung proses adaptasi Klien Pemasarakatan di lingkungan masyarakat. Dengan memberikan pembimbingan yang dibutuhkan kepada Klien Pemasarakatan diharapkan mampu menjadi manusia yang mempunyai kehidupan yang lebih baik di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya.

Penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan dilakukan melalui tahapan penerimaan Klien, pemberian program dan pengakhiran. Pembimbingan Klien berakhir karena telah selesai menjalani masa Pembimbingan Kemasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan atau keputusan menteri/pimpinan Lembaga, meninggal dunia, dicabut Pembimbingannya karena melanggar persyaratan Pembimbingan Kemasyarakatan.

c. Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik Anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang lebih dikenal dengan UUSPPA dibentuk untuk

mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Perubahan mendasar penanganan perkara anak dalam UU SPPA memberi penguatan terhadap peran pemasyarakatan berada dalam keseluruhan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dalam kaitan dengan pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan. Disinilah maka, peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) mendorong penanganan perkara anak melalui diversi dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak, dimana anak adalah subyek dengan kebutuhan khusus dan berhak atas masa depannya. Pendampingan Anak dalam persidanganpun dapat dianggap Batal demi Hukum apabila tidak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

d. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Pasal Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Sebagai salah satu institusi negara yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, Bapas juga mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi pelayanan yang ramah terhadap hak asasi manusia.

Dalam pelaksanaan tugas, Petugas Bapas selalu mengedepankan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Di dalam perlindungan, pemenuhan, penegakan, penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia terdapat 3 prinsip dasar, yaitu: dignity (menjunjung tinggi martabat manusia), equity (kesetaraan) dan universality (berlaku kepada seluruh manusia tanpa terkecuali). Bapas Mataram hadir untuk melindungi hak asasi manusia, hak-hak mendasar yang secara kodrati melekat pada manusia karena kemanusiaannya, sebagai suatu tanggung jawab dan kewajiban dengan memenuhi 3 prinsip tersebut.

ISU STRATEGIS

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram tentunya tidak luput dari permasalahan dan tantangan. Permasalahan dan tantangan jika tidak disikapi dengan tepat tentu saja dapat menghambat dalam pencapaian Kinerja Bapas. Berikut beberapa Permasalahan dan Tantangan yang menjadi Isu Strategis dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram;

a. Luas Wilayah dan Kondisi Geografis

Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram Mempunyai wilayah kerja se-Pulau Lombok dan pulau kecil sekitarnya. Wilayah kerja yang cukup luas merupakan salah satu tantangan yang harus di hadapi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Mataram. Menurut Data Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, di Pulau Lombok Jumlah Kabupaten/Kota adalah 5 Kabupaten/Kota yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah. Kecamatan di seluruh wilayah Lombok dan sekitarnya berjumlah 53 Kecamatan dan jumlah Desa/Kelurahan adalah 598 Desa/Kelurahan. Luas Wilayah kerja 4.738,65 km² meliputi daratan utama dan kepulauan.

Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram merupakan Satuan Kerja Pemasarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Di Pulau Lombok jumlah Satuan Kerja Pemasarakatan (Lapas/Rutan/LPKA) yang menjadi mitra Kerja Bapas Kelas II Mataram berjumlah 6 Satuan Kerja diantaranya : Lapas Perempuan Kelas III Mataram, Lapas Kelas II A Lombok Barat, Lapas Terbuka Lombok Tengah, Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah, Rumah Tahanan Kelas II Praya dan Lapas Kelas IIB Selong.

Jarak tempuh dalam pelaksanaan tugas Penyusunan Litmas, Pembimbingan, Pendampingan serta Pengawasan tergolong cukup

jauh dan memakan waktu yang cukup lama. Apabila diperhatikan dari jarak tempuh dan jangkauan wilayah kerjanya yang terjauh adalah sekitar 80 kilometer. Sedangkan Kondisi Geografis Wilayah Kerja Bapas Mataram terdiri dari Dataran rendah, dataran tinggi, Lautan, Danau/Bendungan, Sungai dan Rawa-rawa. Semua Wilayah Kerja Bapas Kelas II Mataram dapat dijangkau dengan transportasi darat dengan berkendara sepeda motor atau mobil. Tantangan yang dihadapi adalah Ketika menghadapi kemacetan akibat trafik kendaraan yang padat ataupun kemacetan karena digelarnya prosesi adat atau budaya masyarakat. Disamping itu kondisi beberapa infrastruktur jalan yang rusak juga sangat menguras tenaga dan mengancam Keselamatan Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas keseharian di lapangan.

- b. Tingkat kesejahteraan masyarakat Lombok dan Sekitarnya
Perekonomian NTB pada triwulan II 2023 tumbuh sebesar 5,99% (yoy), melambat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,76% (yoy). Pertumbuhan dari sisi Lapangan Usaha (LU) didukung oleh peningkatan kinerja LU Pertambangan dan LU Transportasi. Secara khusus, pertumbuhan lebih tinggi relatif tertahan oleh penurunan kinerja LU Pertanian dan LU Konstruksi, serta perlambatan LU Perdagangan seiring dengan belum kuatnya aktivitas konsumsi masyarakat. Dari sisi pengeluaran, mayoritas komponen utama tercatat tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Konsumsi RT tercatat melambat sejalan dengan LU Perdagangan seiring belum kuatnya daya beli.

Angka pekerja anak di Nusa Tenggara Barat mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Dari data Badan Pusat Statistik, sejak kurun waktu 2019 hingga 2021 persentasi pekerja anak di NTB selalu di atas rata-rata nasional. Perlu kebijakan komprehensif lintas stakeholder untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal tersebut menjadi tantangan bagi para Pembimbing Pemasyarakatan yang menangani Pendampingan Anak untuk mengarahkan Anak tersebut agar mau lanjut bersekolah

dari pada memilih menjadi Pekerja Anak. Tidak jarang juga karena alasan faktor keadaan ekonomi memaksa Klien Pemasarakatan memilih melakukan tindak pidana Kembali.

c. Sosial dan Budaya Masyarakat Lombok dan Sekitarnya

Masyarakat Lombok terdiri dari beraneka ragam suku diantaranya suku Sasak sebagai suku asli Lombok (mayoritas), suku bali, suku mbojo, Suku Mandarin dan suku-suku lain sebagai minoritas. Keanekaragaman ini tidak jarang menjadi pemicu perselisihan berbaur SARA. Faktor sosial dan budaya yang berbeda beda juga menjadi salah satu tantangan para Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan Penelitian Kemasyarakatan, karena tidak jarang masyarakat menolak kehadiran Kembali Klien Pemasarakatan di suatu lingkungan dengan alasan perbedaan suku, budaya dan agama.

SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram tahun 2023.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menyajikan ringkasan isi Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram tahun 2023.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan,

tugas dan fungsi, struktur organisasi, permasalahan dan sistematika laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

menjelaskan visi, misi, dokumen rencana strategis, indikator kinerja utama dan anggaran Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan dalam mencapai target kinerja sesuai perjanjian kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram Tahun 2023

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh laporan kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram tahun 2023 serta upaya dan strategi dalam meningkatkan capaian kinerja tahun berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

Sejalan dengan pemerintah Negara Republik Indonesia, Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram sebagai bagian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berpartisipasi mensukseskan visi Kementerian Hukum dan HAM yaitu;

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram memiliki visi dan misi satuan kerja sebagai berikut;

VISI

Terwujudnya Klien Pemasyarakatan yang Mandiri, taat hukum serta mempunyai harkat dan martabat dan didukung oleh Peningkatan Sumber Daya Petugas Bapas sehingga meningkatkan mutu pelayanan pembimbingan di Balai Pemasyarakatan Mataram.

MISI

Melaksanakan bimbingan terhadap klien Pemasyarakatan. Meningkatkan Profesionalisme petugas Bapas khususnya Pembimbing Kemasyarakatan (PK).

Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram ikut berpartisipasi menjalankan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan uraian sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas
Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab memberikan

layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

2. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan.

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

3. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini akan dilakukan melalui pengelolaan manajerial dengan pendekatan *men, money, materials,*

machines, and methods (5M) secara terukur, dimana *Man* merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. *Money* atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam organisasi. *Materials* terdiri dari bahan yang akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab tanpa adanya materi yang jelas maka manusia tidak akan bisa bekerja terarah dan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. *Machine* atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Dalam hal ini adalah sarana prasarana yang dibutuhkan Kementerian Hukum dan HAM untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya. Sedangkan *methods* adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode adalah penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta anggaran dan kegiatan. Misi ini akan dilaksanakan dengan koridor reformasi birokrasi melalui penataan 8 (delapan) area perubahan secara berkelanjutan.

4. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran Keimigrasian dan Pemasarakatan

Pada misi keenam ini Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemasarakatan. Peran Pemasarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan

kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara.

Rencana strategis satuan kerja pemasyarakatan yang kemudian disebut renstra satker PAS merupakan turunan dari rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tahun 2020-2024 dan Rencana strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2020-2024. Balai Pemasyarakatan kelas II Mataram sebagai satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah Menyusun rencana strategis satuan kerja tahun 2020-2024. Dalam dokumen renstra satker tersebut terdapat poin-poin Indikator Kinerja Utama sesuai tabel dibawah ini;

Tabel target indikator kinerja utama dalam renstra bapas mataram 2020-2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/KEGIATAN	TAHUN			
		2021	2023	2023	2024
1. Meningkatkan pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak Pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	40%	50%	60%	70%
	Persentase Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	65%	60%	55%	50%

	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	25%	30%	35%	40%
2. Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasaryakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsaryakatan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

	Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu				
	Terlaksananya reformasi birokrasi zona WBK/WBBM di UPT.	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	Terlaksananya layanan kerjasama dan kehumasan di UPT.	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	Tersusunnya Dokumen laporan Kinerja di UPT.	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI Nomor: M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020-2024 dan dokumen perjanjian kinerja (PK) Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram Tahun Anggaran 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bapas Kelas II Mataram dengan Kepala

Kantor Wilayah Kemenkumham NTB pada awal tahun 2023, di jabarkan target kinerja Bapas Kelas II Mataram TA.2023 Sebagai berikut;

Tabel target indikator kinerja utama dalam perjanjian kinerja tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga	60%
		2. Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	55%
		3. Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	35%
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	4. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		5. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		6. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	1 Layanan
		7. Jumlah layanan perkantoran	1 layanan
		8. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan

		9. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	54 Unit
		10. Jumlah Gedung/Bangunan	1 Unit

Pagu DIPA awal Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut;

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 704.477.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 704.477.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.217.280.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 4.217.280.000,-

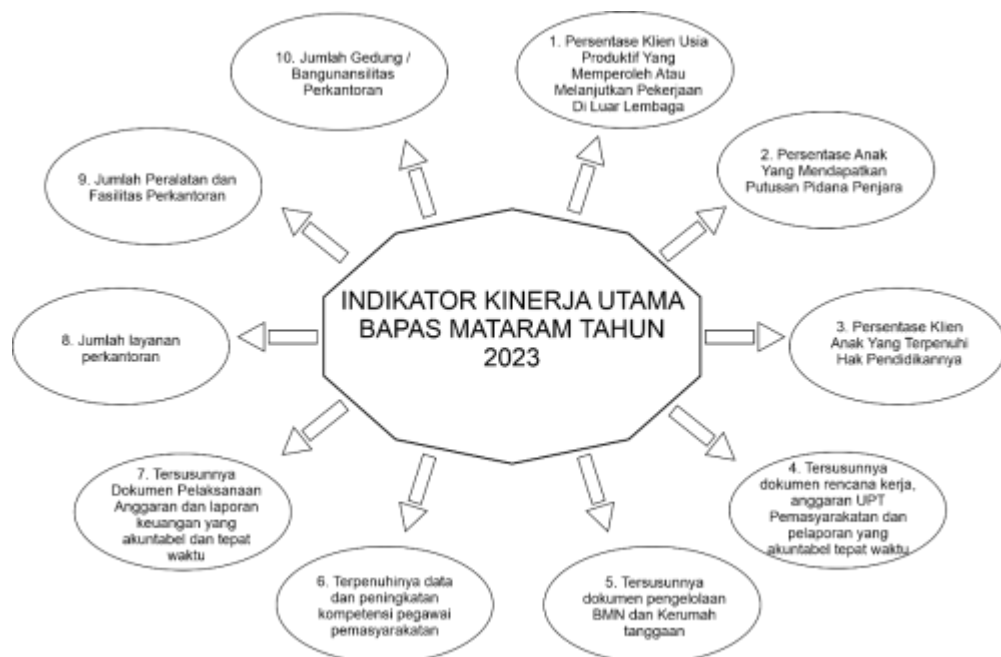
Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor PAS-01.PR.01.01 TAHUN 2022 tentang Manual Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram pada tahun 2023 menargetkan realisasi capaian pada setiap indikator kegiatan sebesar 100 % dengan memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) serta fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi (Bastian, 2006: 274). Capaian kinerja adalah hasil suatu proses yang dilakukan untuk dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Capaian kinerja organisasi hanya dapat diukur setelah ditetapkannya tujuan organisasi. Penetapan tujuan mencerminkan sasaran, hasil yang dihargai/diinginkan di masa depan sebagai tolok ukur kinerja (Locke & Latham, 2006). Tujuan atau target yang dimaksud disini telah tercantum pada dokumen perjanjian kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram tahun anggaran 2023.

Gb. Indikator Kinerja Utama Balai Pemasarakatan Mataram TA.2023



Capaian kinerja dapat diukur dengan melakukan penilaian kerja, baik secara mandiri ataupun penilaian oleh pihak eksternal. Pengukuran capaian pada masing-masing indikator kinerja utama Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram tahun 2023 ditentukan dengan membandingkan jumlah realisasi kinerja dengan target kinerja. Berdasarkan rumus penghitungan diatas maka diperoleh hasil penghitungan realisasi kinerja dan capaian kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram tahun 2023 berikut:

Tabel Realisasi kinerja dan Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGE T	REALIS ASI	CAPAI AN
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar	1	Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga	60%	62%	124 %
		2	Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	55%	30%	200%
		3	Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	35%	100%	333 %
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	4	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100 %
		5	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100 %
		6	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100 %
		7	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100 %

		8	Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100 %
		9	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	54 Unit	54 Unit	100 %
		10	Jumlah Gedung / Bangunan	1 Unit	1 Unit	100 %

Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2023 tentang Pemasyarakatan, Pembimbingan Kemasyarakatan bertujuan agar klien pemasyarakatan tidak lagi melakukan pelanggaran hukum dan menjadi warga negara yang taat pada peraturan serta dapat melakukan fungsi sosialnya secara aktif produktif dan berguna di tengah-tengah masyarakat.

Pembimbingan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam bentuk memberikan arahan, motivasi dan pelatihan kepada klien pemasyarakatan bertujuan agar klien pemasyarakatan memiliki keterampilan dan karakter yang baik sehingga mampu memperoleh pekerjaan yang layak ataupun melanjutkan pekerjaan yang telah dijalani sebelumnya. Usia produktif adalah usia ketika seseorang masih mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu, usia Produktif Orang Dewasa yaitu 18 – 64 tahun.

Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram mendorong agar Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Realisasi kinerja tahun 2023

Menghitung persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga adalah dengan membagi jumlah klien usia produktif yang bekerja dibagi dengan jumlah klien

pemasyarakatan dikali 100%.

Formula :

$$\% \text{ Klien Produktif} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah klien pemasyarakatan produktif yang bekerja

B = Jumlah klien pemasyarakatan

Semakin tinggi angka yang menunjukkan Klien Pemasyarakatan yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan yang layak maka kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram semakin baik. Capaian pada Indikator ini adalah sebesar 87 %. Dengan penjabaran sebagai berikut:

Tabel data realisasi indikator kinerja utama nomor 1

NO	JENIS KELAMIN	STATUS PEKERJAAN		JUMLAH KLIEN (B)	PERSENTASE REALISASI
		BEKERJA (A)	BELUM BEKERJA		
1	LAKI-LAKI	636	105	741	86 %
2	PEREMPUAN	52	0	52	100 %
TOTAL		688	105	793	87 %

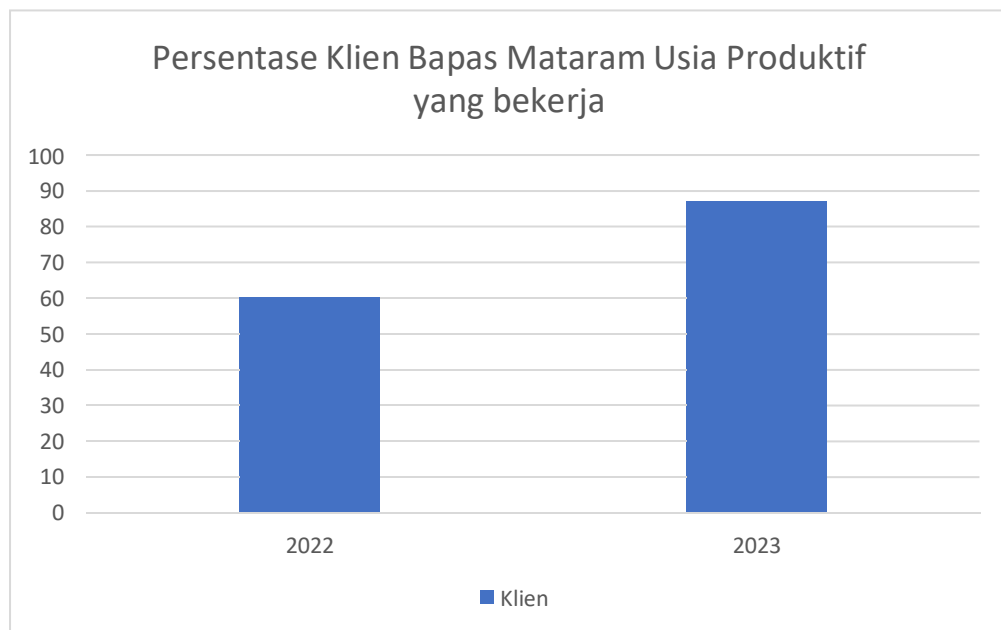
Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi capaian kinerja persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga meningkat. Setelah pada tahun 2022 realisasi capaiannya sebesar 62% meningkat 25% pada tahun 2023 menjadi sebesar 87 %.

Tabel data perbandingan capaian indikator kinerja utama nomor 1

IKU	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga	50%	62%	124 %	60%	87 %	144 %

diagram data perbandingan capaian indikator kinerja utama nomor 1



Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam renstra satuan kerja 2020-2024

Berdasarkan hasil perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam rencana strategis satuan kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram 2020-2024 melebihi target. Realisasi kinerja persentase klien usia produktif yang memperoleh atau

melanjutkan pekerjaan di luar lembaga tahun 2023 sebesar 87% melebihi target dalam rencana strategis satuan kerja tahun 2023 sebesar 60%.

Tabel data perbandingan capaian indikator kinerja utama nomor 1 dengan target dalam renstra satker

INDIKATOR KINERJA UTAMA/KEGIATAN	TAHUN			
	2021	2023	2023	2024
Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	40%	50%	60%	70%

Penyebab keberhasilan

Target Persentase Klien Bapas Mataram Usia Produktif yang bekerja pada tahun 2022 sudah terpenuhi, bahkan 27% melebihi dari nilai persentase yang ditargetkan dalam perjanjian kinerja. Hal tersebut sukses dilakukan Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan kegiatan pemibingan kemandirian dan pembimbingan kepribadian yang efektif membentuk klien bapas menjadi orang yang berkepribadian baik dan mempunyai kemandirian dan keterampilan sehingga siap terjun ke dunia kerja ataupun memulai usahanya sendiri. Klien Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram kembali ke tengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai pribadi produktif dan mampu memperbaiki kualitas ekonomi keluarganya. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pembimbingan kemandirian dan pembimbingan kepribadian antara lain:

Tabel data kedgiatan pembimbingan klien Bapas Mataram 2023

No.	Hari, Tanggal, tempat	Nama Pokmas / Narasumber	Jumlah	Bentuk Kegiatan	Output
1.	Rabu, 19 Januari 2023 , Aula Bapas Mataram	Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB / Dr. Muhammadun, MA.	22 orang	Pembimbingan Kepribadian (Konseling) Anak	Membangun semangat klien anak dan konsultasi orang tua anak
2.	Selasa, 22 Februari 2023, Aula Bapas Mataram	PW. NU NTB / Dr. Fahri Rahman, MA.	24 orang klien	Pembimbingan Kepribadian	Klien tidak mengulangi tindak pidana lagi dan bersemangat memulai babak kehidupan yang baru dan lebih produktif.
3.	Selasa, 15 Maret 2023, Aula Bapas Mataram	1. PHDI NTB / Made Santiadnya, SH.,MH. 2. Kemenag Kota Mataram / Ketut Edy Ariyanto, S.Ag.,M.Pd.H.	24 orang klien	Pembimbingan Kepribadian	Klien tidak mengulangi tindak pidana lagi dan bersemangat memulai babak kehidupan yang baru dan lebih produktif.
4.	Selasa, 19 April 2023, Aula Bapas Mataram	PW. NW NTB / Mustakim, M.Pd.	24 orang klien	Pembimbingan Kepribadian	Klien tidak mengulangi tindak pidana lagi dan bersemangat memulai babak kehidupan yang baru dan lebih

					produktif.
5.	Selasa, 24 Mei 2023, Aula Bapas Mataram	PW Muhammadiyah NTB / Sukarta, M.Pd.I.	25 orang klien	Pembimbingan Kepribadian	Klien tidak mengulangi tindak pidana lagi dan bersemangat memulai babak kehidupan yang baru dan lebih produktif.
6.	17 Mei s/d 13 juni 2023, Gria Abhipraya Mandalika	Bapas Mataram dan BLKDLN	20 orang	Pelatihan Service motor	Menambah skill / keterampilan klien
7.	22 juni s/d 6 Juli 2023, Gria Abhipraya Mandalika	Bapas Mataram dan Kelompok Pengrajin Kayu dan UkirTiga Saudara	20 orang klien	Pelatihan Keterampilan / Pelatihan Pembuatan Cukli	Menambah skill / keterampilan klien
8.	Rabu, 14 Juni 2023, Aula Bapas Mataram	BNN NTB	25 orang klien	Pembimbingan Kepribadian	Bahaya narkoba bagi diri sendiri dan lingkungan
9.	Rabu, 12 Juli 2023, Aula Bapas Mataram	LPA NTB Dr. Muhammadun, MA.	25 orang klien anak dan wali	Pembimbingan Kepribadian	Membangun semangat klien anak dan konseling orang tua anak
10.	Rabu, 9 Agustus 2023, Aula Bapas Mataram	PW. Muhammadiyah NTB	25 orang klien	Pembimbingan Kepribadian	Menjadi pribadi yang merdeka dan produktif
11.	Rabu, 13	Lembaga Bantuan Hukum	25	Pembimbingan	Membangun

	September 2023, Aula Pos Bapas Lombok timur	NW Yayasan Al-Fajr Mataram	orang klien	Kepribadian	pribadi yang positif Demi suksesnya program integrasi klien
12.	Rabu, 11 Oktober 2023, Aula Bapas Mataram	Yayasan Darul Mukmin Lombok Timur IAIH NWDI Pancor	25 orang klien	Pembimbingan Kepribadian	Membangun karakter kuat dan positif
13.	Rabu, 15 November 2023, Aula Bapas Mataram	LPA NTB Dr. Mira Mareta, MA.	25 orang klien anak dan wali	Pembimbingan Kepribadian	Membangun semangat klien anak dan konseling orang tua anak
14.	Rabu, 6 Desember 2023, Gria Abhipraya Mandalika	Universitas Hamzanwadi PW. NWDI NTB	25 orang klien	Pembimbingan Kepribadian	Menjadi pribadi yang tangguh dan bermanfaat

Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang lebih dikenal dengan UUSPPA dibentuk untuk mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, diversi bertujuan untuk Mencapai perdamaian antara korban dan Anak; Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan Menanamkan rasa tanggung

jawab kepada Anak.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram wajib melaksanakan pendampingan terhadap anak yang behadapan dengan hukum mulai dari proses praadjudikasi hingga proses pasca adjudikasi. Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram mendorong agar persentase menurunnya Anak yang mendapat putusan pidana penjara dari tahun ke tahun semakin menurun.

Realisasi kinerja tahun 2023

Menghitung realisasi persentase menurunnya Anak yang mendapat putusan pidana penjara adalah dengan membagi jumlah Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara dibagi dengan jumlah pendampingan Anak dikali 100%.

Formula :

$$\% \text{ Anak putusan penjara} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Anak yang mendapat putusan pidana penjara

B = Jumlah pendampingan anak

Semakin rendah angka realisasi persentase, menunjukkan Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara semakin sedikit maka kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram semakin baik. Persentase realisasi pada Indikator ini adalah sebesar 24 %. Dengan

penjabaran sebagai berikut:

Tabel data realisasi indikator kinerja utama nomor 2

NO	Jumlah pendampingan Anak (B)	Jumlah putusan pidana penjara (A)	Realisasi	Persentase Capaian
1	106	25	24 %	125%

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi kinerja persentase menurunnya Anak yang mendapat putusan pidana penjara menurun. Hal tersebut menunjukkan kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram pada tahun 2023 semakin baik. Tahun 2022 realisasi capaiannya sebesar 30%, menurun 6% pada tahun 2023 menjadi sebesar 24 %.

Tabel data perbandingan capaian indikator kinerja utama nomor 2

IKU	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga	60%	30%	200%	55 %	24%	229 %

Diagram data perbandingan capaian indikator kinerja utama nomor 2



Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam renstra satuan kerja 2020-2024

Berdasarkan hasil perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam rencana strategis satuan kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram 2020-2024 melebihi target. Realisasi kinerja persentase menurunnya Anak yang mendapat putusan pidana penjara tahun 2023 sebesar 24% telah melebihi target maksimal dalam rencana strategis satuan kerja tahun 2023 sebesar 55%.

Tabel data perbandingan capaian indikator kinerja utama nomor 1 dengan target dalam renstra satker

INDIKATOR KINERJA UTAMA/KEGIATAN	TAHUN			
	2021	2023	2023	2024
Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	65%	60%	55%	50%

Penyebab keberhasilan

Target Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara pada tahun 2023 sudah terpenuhi, bahkan 31% melebihi dari nilai persentase maksimal yang ditargetkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023. Hal tersebut sukses dilakukan Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram dengan mendorong Pembimbing Kemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan pendampingan Anak yang berkonflik dengan hukum sehingga Anak terhindar dari putusan penjara. Sehingga Anak dapat kembali kepada rutinitas sehari-harinya tanpa menimbulkan stigma negatif di tengah-tengah masyarakat dan mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pendampingan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum dengan rincian sebagai berikut:

Tabel data jumlah pendampingan Anak

No	Jenis pendampingan Anak	Jumlah pendampingan (kali)
1	Diversi	53
2	Sidang di Pengadilan	53
TOTAL		106

Berdasarkan total 53 Anak yang telah dilakukan pendampingan diversifikasi pada tahun 2023 maka didapatkan data hasil pendampingan diversifikasi pada Anak sebagai berikut:

Tabel data jumlah hasil deversifikasi Anak

No	Jumlah diversifikasi	AKOT	NON AKOT	Belum ada putusan (proses)
1	53	30	25	0

Penanganan terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum memang tidak selalu dapat diselesaikan dengan proses diversi, jika gagal dalam proses diversi ataupun tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi, maka sesuai dengan syarat dan ketentuan yang di atur dalam perundang-undangan penanganan perkara Anak yang harus dilakukan melalui proses sidang di pengadilan, berikut merupakan data pendampingan Anak dalam proses sidang di Pengadilan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram selama tahun 2023;

Tabel data jumlah hasil putusan sidang pengadilan Anak

No	Jumlah sidang pengadilan	Jumlah putusan penjara	Jumlah putusan tidak dipenjara	Belum ada putusan (proses)
1	53	25	28	0

Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak Pendidikan untuk Anak merupakan hal yang sangat penting untuk diperjuangkan, apapun situasi yang sedang dihadapi oleh Anak, pendidikan tetap tidak boleh ditinggalkan karena hal tersebut sangat menentukan masa depan Anak.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram melaksanakan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum mulai dari proses

praadjudikasi hingga proses pascaadjudikasi. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang menjadi Klien Anak Balai Pemasarakatan diharapkan tetap memperoleh haknya untuk memperoleh pendidikan. Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pendamping Klien Anak mengupayakan agar Klien Anak tetap dapat memperoleh atau melanjutkan pendidikannya dengan tujuan agar Anak sebagai generasi penerus bangsa dapat melanjutkan tujuan dan meraih cita-citanya. Kegiatan Belajar mengajar tersebut dapat dilaksanakan dan diikuti oleh klien Anak di dalam Lembaga maupun di luar Lembaga.

Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram mendorong agar persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Realisasi kinerja tahun 2023

Menghitung persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya adalah dengan membagi jumlah Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara dibagi dengan jumlah pendampingan Anak dikali 100%.

Formula :

$$\% \text{ Anak lanjut bersekolah} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah klien Anak yang melanjutkan pendidikan

B = Jumlah klien Anak

Semakin tinggi angka persentase yang menunjukkan Anak melanjutkan pendidikan semakin banyak maka kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram semakin baik. Capaian pada Indikator ini adalah sebesar 100 %.

Tabel data realisasi indikator kinerja utama nomor 3

No	Indikator Kinerja Utama	Jumlah klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya (A)	Jumlah klien Anak (B)	Persentase realisasi
1	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	53	53	100%

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi kinerja persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya meningkat. Hal tersebut menunjukkan kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram pada tahun 2023 semakin baik. Tahun 2022 realisasi capaiannya sebesar 100% dan pada tahun 2023 tetap sebesar 100 %.

Tabel data perbandingan capaian indikator kinerja utama nomor 3

IKU	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%	100%	333%	35 %	100%	285 %

Diagram data perbandingan capaian indikator kinerja utama nomor 3



Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam renstra satuan kerja 2020-2024

Berdasarkan hasil perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam rencana strategis satuan kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram 2020-2024 melebihi target. Realisasi kinerja persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya tahun 2023 sebesar 100% telah melebihi target maksimal dalam rencana strategis satuan kerja tahun 2023 sebesar 35%.

Tabel data perbandingan capaian indikator kinerja utama nomor 3 dengan target dalam renstra satker

INDIKATOR KINERJA UTAMA/KEGIATAN	TAHUN			
	2021	2023	2023	2024
Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	25%	30%	35%	40%

Penyebab keberhasilan

Target Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya pada tahun 2023 sudah terpenuhi, bahkan 65% melebihi dari nilai persentase minimal yang ditargetkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023. Hal tersebut sukses dilakukan Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram dengan mendorong Pembimbing Kemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan pendampingan Anak yang berkonflik dengan hukum dan meningkatkan Kerjasama dengan stakeholder penyelenggara program Pendidikan formal maupun informal sehingga klien Anak tetap dapat mengenyam pendidikan. Selama tahun 2023 klien Anak yang melanjutkan sekolah rinciannya sebagai berikut:

Tabel data jenjang pendidikan klien Anak

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Sekolah Menengah Atas (SMA)	39	73 %
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	14	27 %
TOTAL		53	100%

Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu

Kegiatan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2024 di Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram berjalan dengan baik. Setiap tahunnya juga disusun laporan kinerja satuan kerja yang direkapitulasi dan dilaporkan setiap bulan dengan tepat waktu.

Balai pemasarakatan kelas II Mataram mendorong agar kualitas penyusunan rencana kerja anggaran dan pelaporan kinerja setiap tahun semakin meningkat kualitasnya diikuti juga dengan digitalisasi pada setiap prosesnya.

Realisasi kinerja tahun 2023

Menghitung realisasi kinerja tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu adalah dengan membagi jumlah target kinerja dengan realisasi kinerja dikali 100%.

Formula :

$$\text{Persentase capaian} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Target

B = Realisasi

Semakin tinggi angka persentase menunjukkan kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram semakin baik. Capaian pada Indikator ini adalah sebesar 100 %.

Tabel data realisasi indikator kinerja utama nomor 4

No	Indikator Kinerja Utama	Target (A)	Realisasi (B)	Persentase realisasi
1	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel	1 layanan	1 layanan	100%

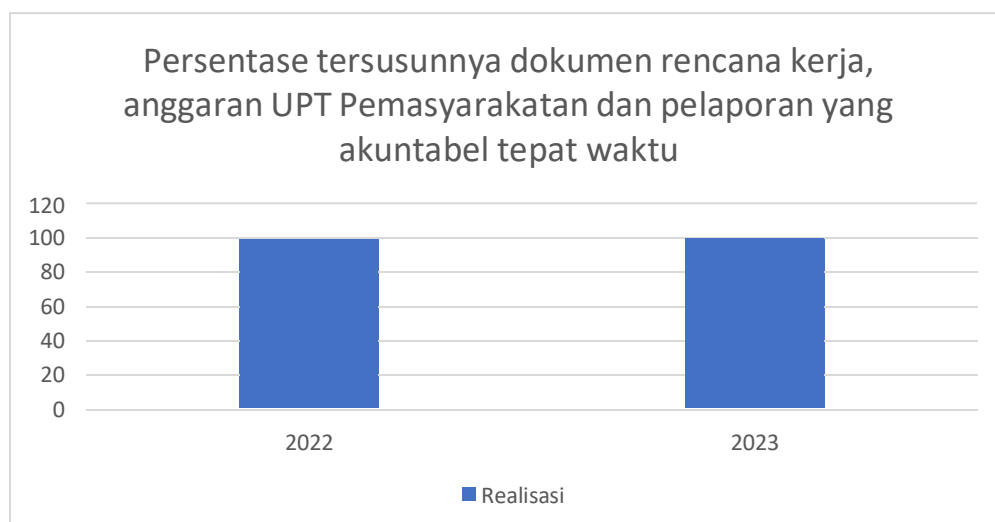
Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi kinerja tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu meningkat. Hal tersebut menunjukkan kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram pada tahun 2023 semakin baik. Tahun 2022 realisasi capaiannya sebesar 100% dan pada tahun 2023 tetap sebesar 100 %.

Tabel data perbandingan capaian indikator kinerja utama nomor 4

IKU	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%

Diagram data perbandingan capaian indikator kinerja utama nomor 4



Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam renstra satuan kerja 2020-2024

Berdasarkan hasil perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam rencana strategis satuan kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram 2020-2024, realisasi kinerja Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu tahun 2023 sebesar 1 layanan telah mencapai target dalam rencana strategis satuan kerja

tahun 2023 sebesar 1 layanan.

Tabel data perbandingan capaian indikator kinerja utama nomor 4 dengan target dalam renstra satker

INDIKATOR KINERJA UTAMA/KEGIATAN	TARGET TAHUN			
	2021	2023	2023	2024
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

Penyebab keberhasilan

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-K/L) dan dokumen data dukungnya dilaksanakan selama kurun waktu 11 bulan. Setiap tahap penyusunan anggaran mulai dari tahap penyusunan angka kebutuhan kemudian tahap pagu indikatif, pagu alokasi, dan terakhir penetapan DIPA tahun anggaran 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Hal tersebut meliputi beberapa dokumen seperti; Rencana Kerja Satuan Kerja; Rincian Kertas Kerja; Kerangka Acuan Kerja (KAK); Rencana Anggaran Biaya (RAB); dokumen Rencana Penarikan Dana (RPD); serta dokumen Kalender Kerja tahun anggaran 2024. Proses perencanaan yang terdigitalisasi pun telah dilaksanakan melalui aplikasi sakti (<https://sakti.kemenkeu.go.id/>), aplikasi e-rengar (<https://rengar.kemenkumham.go.id/>), serta aplikasi krisna (<https://kemenkumham.kl.krisna.systems/>). Hasil akhir dari proses kegiatan penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga tahun 2024 adalah telah disahkannya Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Masyarakat Kelas II Mataram tahun 2024 nomor SP DIPA-013.05.2.407607/2024 tanggal 23 November 2023. Dalam DIPA Balai Masyarakat Kelas II Mataram tahun 2024

terdapat jumlah pagu anggaran yang dialokasikan, target rincian output (RO) yang harus dicapai serta rencana penarikan dana yang ditetapkan.

Pelaporan yang akuntabel tepat waktu di Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram tahun 2023 telah dilaksanakan dengan baik. Penilaian dan evaluasi kinerja internal dilaksanakan setiap bulan melalui rapat seluruh pejabat struktural. Setiap hasil rapat evaluasi menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan bulan selanjutnya demi mendapatkan hasil kinerja yang maksimal. Digitalisasi pelaporan kinerja rutin dan tepat waktu melalui penginputan data melalui aplikasi e-performance (<https://e-performance.kemenkumham.go.id/>), aplikasi e-monev bappenas (<https://e-monev.bappenas.go.id/>) dan aplikasi website Sprinterpas (<https://sprinterpas.com/>). Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Balai Pemasarakatan kelas II Mataram tahun 2023 menjadi laporan akhir atas Kinerja Instansi selama setahun. Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram tahun 2023 telah disusun dan dilaporkan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat bersama dengan laporan-laporan lainnya.

Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan.

Kegiatan pengelolaan BMN dan kerumahtanggan tahun 2024 di Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram berjalan dengan baik. Setiap tahunnya juga disusun laporan pengelolaan BMN dan dokumen catatan atas laporan Barang Milik Negara (CAL-BMN)

Balai pemasarakatan kelas II Mataram mendorong agar kualitas pengelolaan BMN dan kerumahtanggan tahun 2024 setiap tahun semakin meningkat kualitasnya diikuti juga dengan digitalisasi pada setiap prosesnya.

Realisasi kinerja tahun 2023

Menghitung realisasi kinerja tersusunnya dokumen pengelolaan

BMN dan Kerumah tanggaan adalah dengan membagi jumlah target kinerja dengan realisasi kinerja dikali 100%.

Formula :

$$\text{Persentase capaian} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Target

B = Realisasi

Semakin tinggi angka persentase menunjukkan kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram semakin baik. Capaian pada Indikator ini adalah sebesar 100 %.

Tabel data realisasi indikator kinerja utama nomor 5

No	Indikator Kinerja Utama	Target (A)	Realisasi (B)	Persentase realisasi
1	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 layanan	1 layanan	100%

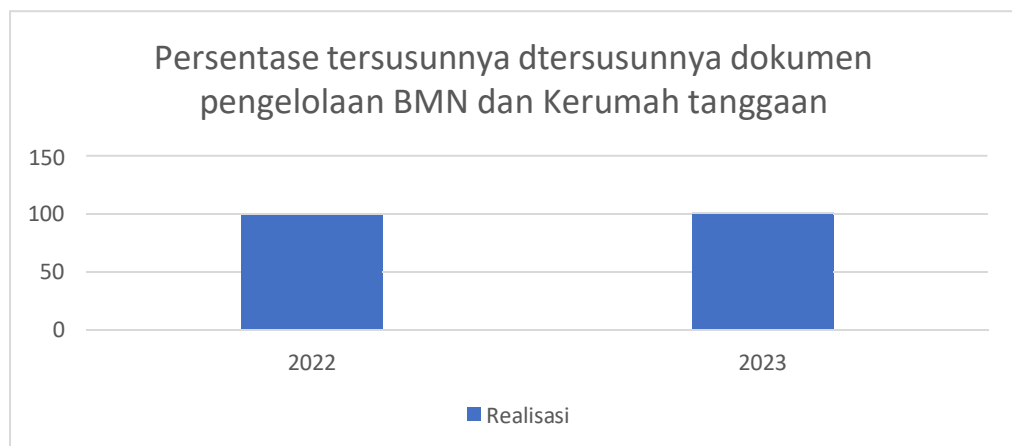
Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi kinerja tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan meningkat. Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram pada tahun 2023 berhasil mempertahankan capaian 100% dari tahun ke tahun. Tahun 2022 realisasi capaiannya sebesar 100% dan pada tahun 2023 tetap sebesar 100 %.

Tabel data perbandingan capaian indikator kinerja utama nomor 5

IKU	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layan an	1 Layan an	100%	1 Layan an	1 Layan an	100%

Diagram data perbandingan capaian indikator kinerja utama nomor 5



Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam renstra satuan kerja 2020-2024

Berdasarkan hasil perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam rencana strategis satuan kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram 2020-2024, realisasi kinerja tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan tahun 2023 sebesar 1 layanan telah mencapai target dalam rencana strategis satuan kerja tahun 2023 sebesar 1 layanan.

Tabel data perbandingan capaian indikator kinerja utama nomor 5 dengan target dalam renstra satker

INDIKATOR KINERJA UTAMA/KEGIATAN	TARGET TAHUN			
	2021	2023	2023	2024
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Laya nan	1 Laya nan	1 Laya nan	1 Laya nan

Penyebab keberhasilan

Penyusunan Pada target Kinerja Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan Kegiatan telah dilaksanakan oleh Operator Umum dan BMN Balai Masyarakat Kelas II Mataram. Kegiatan tersebut meliputi rangkaian kegiatan antara lain pengelolaan urusan perencanaan, pengadaan dan analisis kebutuhan barang milik negara, penghapusan barang milik negara dengan kondisi rusak berat, pengawasan dan pengendalian barang milik negara, pengelolaan urusan penatausahaan barang milik negara, pengelolaan urusan perawatan barang milik negara dan rumah tangga.

Dalam rangka menindaklanjuti keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-289.PB.03.02 Tahun 2023 tentang Barang Milik Negara yang berfungsi Khusus perlu membentuk tim inventarisasi barang milik negara yang berfungsi khusus pada Balai Masyarakat Kelas II Mataram. Oleh karena itu di tahun 2023 Kepala Balai Masyarakat Kelas II Mataram telah menunjuk operator BMN untuk melaksanakan Inventarisasi BMN berfungsi khusus di lingkungan kantor Balai Masyarakat Kelas II Mataram.

Keberhasilan kinerja pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 terdapat peningkatan dalam hal peningkatan PNBPN yang bersumber dari penghapusan BMN

dengan kondisi rusak berat melalui penjualan secara lelang dan sewa rumah negara. Tahun 2022 hanya dilakukan 1 (satu) kali penghapusan BMN (Barang Milik Negara) berupa peralatan dan mesin yang nilainya di bawah 100 juta dengan jumlah 112 (unit) dengan nilai lelang (PNBP) sebesar Rp. 2.114.257,00 (Dua juta seratus empat belas ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah). Jika di dibandingkan dengan tahun 2023 terjadi 2 (dua) kali penghapusan yakni 1 unit rumah negara dan 104 (unit) peralatan mesin yang nilainya di bawah 100 juta dengan total nilai lelang (PNBP) sebesar Rp. 3.630.000,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Keberhasilan kinerja dalam hal meningkatkan sarana dan prasarana kantor selain dari usulan peralatan dan mesin juga diusulkan renovasi rumah negara dan gedung bangunan kantor yang telah disusun dan diusulkan melalui aplikasi SIP BMN. Hal tersebut guna menunjang tugas dan fungsi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tahun 2022 belum diusulkan renovasi rumah negara dan renovasi gedung bangunan kantor, pada tahun 2023 telah di usulkan renovasi rumah negara dan renovasi bangunan gedung Kantor dengan melampirkan data dukung dari dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTB disertai dengan data dukung berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Terkait adanya kesalahan kode pencatatan BMN di tahun 2023, Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram telah menerbitkan Surat Keputusan koreksi pencatatan. Pencatatan data Barang Milik Negara pada aplikasi SAKTI sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga akurat dan akuntabel. Pada tahun 2023 telah diselesaikan dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2024 dan telah disahkan pada bulan Februari 2023.

Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan

Kegiatan pengelolaan data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan tahun 2024 di Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram berjalan dengan baik. Setiap tahunnya juga disusun laporan pengelolaan kepegawaian dan analisis beban kerja.

Balai pemasyarakatan kelas II Mataram mendorong agar kualitas pengelolaan data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan setiap tahun semakin meningkat diikuti juga dengan digitalisasi pada setiap prosesnya.

Realisasi kinerja tahun 2023

Menghitung realisasi kinerja terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan adalah dengan membagi jumlah target kinerja dengan realisasi kinerja dikali 100%.

Formula :

$$\text{Persentase capaian} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Target

B = Realisasi

Semakin tinggi angka persentase menunjukkan kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram semakin baik. Capaian pada Indikator ini adalah sebesar 100 %.

Tabel data realisasi indikator kinerja utama nomor 6

No	Indikator Kinerja Utama	Target (A)	Realisasi (B)	Persentase realisasi
1	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 layanan	1 layanan	100%

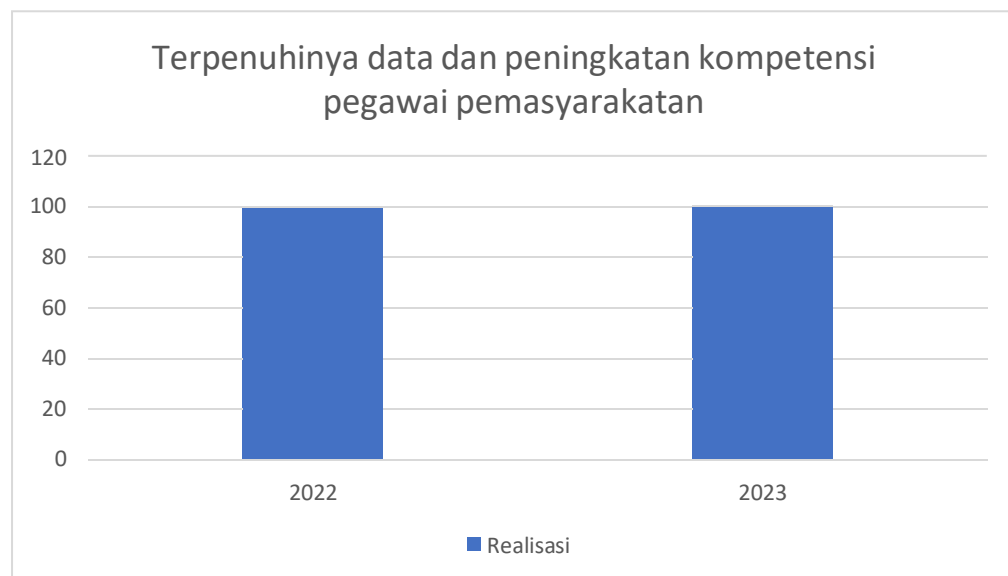
Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi kinerja terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan meningkat. Kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram pada tahun 2023 berhasil mempertahankan capaian 100% dari tahun ke tahun. Tahun 2022 realisasi capaiannya sebesar 100% dan pada tahun 2023 tetap sebesar 100 %.

Tabel data perbandingan capaian indikator kinerja utama nomor 6

IKU	2022			2023		
	Targe t	Realisa si	Capaia n	Targe t	Realisa si	Capaia n
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Laya nan	1 Laya Nan	100%	1 Laya nan	1 Laya nan	100%

Diagram data perbandingan capaian indikator kinerja utama nomor 6



Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam renstra satuan kerja 2020-2024

Berdasarkan hasil perbandingan realisasi kinerja tahun 2023

dengan target jangka menengah dalam rencana strategis satuan kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram 2020-2024, realisasi kinerja terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan tahun 2023 sebesar 1 layanan telah mencapai target dalam rencana strategis satuan kerja tahun 2023 sebesar 1 layanan.

Tabel data perbandingan realisasi indikator kinerja utama nomor 6 dengan target dalam renstra satker

INDIKATOR KINERJA UTAMA/KEGIATAN	TARGET TAHUN			
	2021	2023	2023	2024
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

Penyebab keberhasilan

Kegiatan pengelolaan data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan tahun 2024 di Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram dilaksanakan oleh pegawai dengan jabatan pengelola kepegawaian. Kegiatan pengelolaan data dan peningkatan kompetensi pegawai meliputi pengelolaan data pegawai pada aplikasi simpeg kemenkumham, kenaikan pangkat pegawai, kenaikan jenjang jabatan, pengusulan SK PNS, pengelolaan absensi dan cuti, penyusunan analisis beban kerja (ABK), pengusulan kebutuhan diklat, pelaksanaan pelatihan atau peningkatan kompetensi pegawai dan hal-hal lain menyangkut kepegawaian.

Pada tahun 2023 jumlah seluruh pegawai Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram adalah 57 orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara sebanyak 51 orang dan PPNPN sebanyak 6 orang terdiri dari 3 orang Satpam dan 3 orang Pramubhakti. Jumlah total pegawai ini berkurang bila dibandingkan dengan tahun 2022 yakni 64 orang terdiri

dari ASN sebanyak 58 orang dan PPNPN sebanyak 6 orang terdiri dari 3 orang Satpam dan 3 orang Pramubhakti.

Tabel data jumlah pegawai dan jabatan tahun 2022 dan 2023

No	Jabatan	Jumlah Tahun 2022	Jumlah Tahun 2023
1.	Jabatan Struktural		
	a. Eselon IV	1	1
	b. Eselon V	3	3
2.	Jabatan Fungsional Tertentu		
	a. Pembimbing Masyarakat	28	21
	b. Asisten PK	10	9
3	Jabatan Pelaksana		
	a. Fungsional Umum	16	13
	b. CPNS	0	2
	c. PPNPN	6	6
TOTAL		64	57

Data Kepegawaian Balai Masyarakat Kelas II Mataram tahun 2023 telah 100 % dapat diakses secara online melalui aplikasi Simpeg Kemenkumham (<https://simpeg.kemenkumham.go.id/>). Pembaruan dan pengarsipan data pegawai telah dilakukan secara rutin melalui aplikasi simpeg untuk mengakomodir data yang valid dan faktual. Hal ini merupakan keberhasilan capaian digitalisasi data pegawai Balai Masyarakat kelas II Mataram yang telah dilaksanakan dengan baik.

Pada Tahun 2023 terdapat 17 orang pejabat fungsional Pembimbing Masyarakat yang mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional Pembimbing Masyarakat dan sudah

diusulkan sejumlah 6 orang dan sisanya lagi 11 orang masih menunggu diusulkan sesuai periode pengusulan kenaikan jenjang selanjutnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, pegawai telah mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang pejabat fungsional pembimbing kemasyarakatan sebanyak 2 orang dari 38 jumlah pejabat fungsional pembimbing kemasyarakatan.

Tabel data Keikutsertaan Pegawai dalam Penilaian Kompetensi tahun 2023

NO	Jenis Penilaian Kompetensi	Jumlah Pejabat Fungsional PK	Yang Sudah Mengikuti	Yang Belum Mengikuti	Keterangan
1	Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Pembimbing Kemasyarakatan Gel I TA 2023	30	6	24	31 Maret s/d 11 April 2023
2	Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Pembimbing Kemasyarakatan Gel II TA 2023	30	10	14	11 s/d 18 September 2023
3	Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Pembimbing Kemasyarakatan Gel III TA 2023	30	1	13	31 s/d 03 November 2023

Peningkatan Kompetensi pegawai pemasyarakatan dalam bentuk pembinaan fisik, mental dan disiplin pada tahun 2023 melauai dilaksanakan rutin dalam bentuk berbagai macam bentuk olahraga dan Kegiatan *Outbond Team Building* dengan tujuan untuk menjaga Kesehatan fisik pegawai, mempererat rasa kebersamaan dan meningkatkan kerjasama tim dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Beberapa pelatihan juga dilaksanakan seperti pelatihan pemberian pelayanan prima yang narasumbernya berasal dari Lembaga yang kredibel. Pelatihan ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan pengetahuan kepada pegawai tentang tata cara pelayanan prima

kepada masyarakat sebagai penerima layanan.

Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

Kegiatan pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu tahun 2024 di Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram berjalan dengan baik. Setiap tahun disusun dokumen catatan akhir atas laporan keuangan (CALK) Balai Pemasarakatan kelas II Mataram.

Balai pemsarakatan kelas II Mataram mendorong agar Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu setiap tahun semakin meningkat kualitasnya diikuti juga dengan digitalisasi pada setiap prosesnya.

Realisasi kinerja tahun 2023

Menghitung realisasi kinerja Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu adalah dengan membagi jumlah target kinerja dengan realisasi kinerja dikali 100%.

Formula :

$$\text{Persentase capaian} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Target

B = Realisasi

Semakin tinggi angka persentase menunjukkan kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram semakin baik. Capaian pada Indikator ini adalah sebesar 100 %.

Tabel data realisasi indikator kinerja utama nomor 7

No	Indikator Kinerja Utama	Target (A)	Realisasi (B)	Persentase realisasi
1	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 layanan	1 layanan	100%

diagram data realisasi indikator kinerja utama nomor 7



Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi kinerja terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat meningkat. Kinerja Balai Masyarakat Kelas II Mataram pada tahun 2023 berhasil mempertahankan capaian 100% dari tahun ke tahun. Tahun 2022 realisasi capaiannya sebesar 100%

dan pada tahun 2023 tetap sebesar 100 %.

Tabel data perbandingan capaian indikator kinerja utama nomor 7

IKU	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam renstra satuan kerja 2020-2024

Berdasarkan hasil perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam rencana strategis satuan kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram 2020-2024, realisasi kinerja Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu tahun 2023 sebesar 1 layanan telah mencapai target dalam rencana strategis satuan kerja tahun 2023 sebesar 1 layanan.

Tabel data perbandingan realisasi indikator kinerja utama nomor 7 dengan target dalam renstra satker

INDIKATOR KINERJA UTAMA/KEGIATAN	TARGET TAHUN			
	2021	2023	2023	2024
Terpenuhinya Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

Penyebab keberhasilan

Kegiatan pengelolaan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu tahun 2024 di Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram dilaksanakan oleh pegawai dengan jabatan pengelola keuangan dan Bendahara. Kegiatan pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan meliputi kegiatan melaksanakan Anggaran dan pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja.

Dalam rangka pelaksanaan anggaran yang akuntabel Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram membuat Surat Keputusan (SK) Tim Pengelola Keuangan tahun anggaran 2024. Dalam isi surat keputusan mengangkat pejabat / pegawai sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Anggaran Belanja Pegawai (PPABP) Staf Pengelola Keuangan, Operator BMN serta Operator SAIBA Tahun Anggaran 2024.

Keberhasilan kinerja pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 terdapat peningkatan dalam hal capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja dengan rata-rata nilai 97. Ini menunjukkan kinerja pelaksanaan anggaran pada Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram dalam performa yang baik. Kendala-kendala dalam pelaksanaan anggaran telah diselesaikan dengan melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram dan Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Keberhasilan kinerja pelaksanaan anggaran juga tercermin dari nilai monitoring dan evaluasi SMART Kementerian Keuangan satuan kerja Balai Pemasarakatan selalu memperoleh nilai baik.

Tabel nilai capaian kinerja menurut aplikasi IKPA dan SMART

NO	Bulan	Tolak ukur penilaian	
		Aplikasi IKPA Kemenkeu	Aplikasi SMART
1	Januari	85.39	Baik
2	Februari	98.19	baik
3	Maret	100.00	Baik
4	April	97.83	baik
5	Mei	100.00	Baik
6	Juni	99.00	baik
7	Juli	97.89	Baik
8	Agustus	98.61	baik
9	September	98.75	Baik
10	Oktober	98.14	baik
11	November	98.33	Baik
12	Desember	98.20	Sangat baik

Dalam hal pelaporan dan pembukuan oleh bendahara pengeluaran satuan kerja pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara telah dilaksanakan dan dilaporkan dengan baik setiap bulan. Rekonsiliasi laporan keuangan dengan KPPN Mataram telah dilaksanakan secara akuntabel dan tepat waktu. sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Rekonsiliasi Pelaporan Keuangan dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi SAKTI kemenkeu. Hal tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan tepat waktu. Digitalisasi pelaporan melalui Aplikasi Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi atau MonSAKTI merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan dalam pelaksanaan monitoring, rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan. Aplikasi MonSAKTI yang dapat diakses melalui link <https://monsakti.kemenkeu.go.id/>

Sebagai laporan akhir telah diselesaikan dokumen catatan atas laporan keuangan (CALK) yang merangkum pelaksanaan dan pelaporan keuangan Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram tahun 2023.

Jumlah layanan perkantoran

Kegiatan layanan perkantoran tahun 2024 di Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram berjalan dengan baik. Peningkatan layanan perkantoran pada Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram sangat dirasakan manfaatnya oleh pegawai dan masyarakat sebagai penerima layanan. Layanan perkantoran meliputi Kesehatan pegawai, pakaian dinas pegawai, pemeliharaan gedung, pemeliharaan kendaraan, langganan daya jasa, jamuan tamu dan lainnya.

Balai pemsarakatan kelas II Mataram mendorong agar Kegiatan layanan perkantoran setiap tahun semakin meningkat kualitasnya diikuti juga dengan digitalisasi pada setiap prosesnya.

Realisasi kinerja tahun 2023

Menghitung realisasi kinerja jumlah layanan perkantoran adalah dengan membagi jumlah target kinerja dengan realisasi kinerja dikali 100%.

Formula :

$$\text{Persentase capaian} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Target

B = Realisasi

Semakin tinggi angka persentase menunjukkan kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram semakin baik. Capaian pada Indikator ini adalah sebesar 100 %.

Tabel data realisasi indikator kinerja utama nomor 8

No	Indikator Kinerja Utama	Target (A)	Realisasi (B)	Persentase realisasi
1	Jumlah layanan perkantoran	1 layanan	1 layanan	100%

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi kinerja jumlah layanan perkantoran meningkat. Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram pada tahun 2023 berhasil mempertahankan capaian 100% dari tahun ke tahun. Tahun 2022 realisasi capaiannya sebesar 100% dan pada tahun 2023 tetap sebesar 100 %.

Tabel data perbandingan capaian indikator kinerja utama nomor 8

IKU	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%

diagram data realisasi indikator kinerja utama nomor 8



Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam renstra satuan kerja 2020-2024

Berdasarkan hasil perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam rencana strategis satuan kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram 2020-2024, realisasi kinerja

jumlah layanan perkantoran tahun 2023 sebesar 1 layanan telah mencapai target dalam rencana strategis satuan kerja tahun 2023 sebesar 1 layanan.

Tabel data perbandingan realisasi indikator kinerja utama nomor 8 dengan target dalam renstra satker

INDIKATOR KINERJA UTAMA/KEGIATAN	TARGET TAHUN			
	2021	2023	2023	2024
Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

Penyebab keberhasilan

Keberhasilan kinerja Layanan Perkantoran pada Balai Pemasarakatan tahun 2023 meliputi;

Kesehatan Pegawai, Kegiatan dalam rangka memenuhi kesehatan bagi pegawai tahun 2023, untuk para pegawai disediakan kebutuhan obat keperluan P3K untuk mengantisipasi Kejadian Kecelakaan Saat Bekerja.

Pakaian Dinas, Kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pakaian dinas TA. 2023 bagi pegawai. Pakaian dinas diberikan kepada kepada 6 orang pegawai PPNPN masing-masing 2 stel Pakaian Kerja.

Pemeliharaan Gedung, Sub komponen ini sudah digunakan untuk mendukung terpeliharanya kondisi gedung dan kantor sebagaimana mestinya sehingga terpenuhinya standar bangunan kantor yang akan dipergunakan untuk kegiatan 1 tahun anggaran 2023.

Pemeliharaan Peralatan Perkantoran, Sub komponen ini sudah digunakan untuk mendukung terpeliharanya Peralatan Perkantoran sebagaimana mestinya yang akan dipergunakan untuk kegiatan 1 tahun anggaran 2023 yang digunakan untuk biaya perbaikan, pembelian komponen alat dan biaya jasa;

Pemeliharaan Kendaraan, Sub komponen ini sudah digunakan

untuk mendukung terpeliharanya kendaraan bermotor sebagaimana mestinya yang akan dipergunakan untuk kegiatan 1 tahun anggaran yang digunakan untuk biaya perbaikan, pembelian onderdil dan pengurusan perijinan operasional kendaraan.

Langganan Daya dan Jasa, Sub Komponen ini sudah digunakan untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan pada satker Pemasarakatan yang akan dipergunakan untuk kegiatan 1 tahun anggaran 2023 yang digunakan untuk membayar Langganan Jasa Telepon, Listrik, Air, Gas, Internet (pusat dan wilayah) dan Sampah.

Jasa Pos, Sub Komponen ini sudah digunakan untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan surat-surat dinas melalui Jasa Pos selama 1 tahun anggaran 2023.

Keperluan Perkantoran, Sub Komponen ini sudah digunakan untuk mendukung terlaksananya kegiatan Keperluan Sehari-hari Perkantoran pada satker Pemasarakatan yang akan dipergunakan untuk kegiatan 1 tahun anggaran 2023 yang digunakan untuk pemenuhan keperluan pokok ASN Bapas, dan Pembayaran gaji bulanan dan gaji ke-13 untuk 6 (enam) Orang PPNPN Bapas Kelas II Mataram.

Jamuan Tamu, Sub Komponen ini sudah digunakan untuk mendukung Pemenuhan kebutuhan sajian jika ada tamu yang berkunjung ke Kantor Balai Pemasarakatan Mataram selama Tahun Anggaran 2023.

Honor Operasional Satuan Kerja, Sub Komponen ini sudah digunakan untuk mendukung terlaksananya kegiatan Honorarium Pejabat Pengelolaan Keuangan pada satker Balai Pemasarakatan Mataram yang dipergunakan untuk kegiatan 1 tahun anggaran 2023 (KPA, Penandatanganan SPM, Bendahara dan Pengelola Keuangan).

Penanganan dan Pencegahan Covid-19, Sub Komponen ini sudah digunakan untuk mendukung upaya penanganan dan pencegahan penularan virus covid-19 di lingkungan kerja Balai

Pemasyarakatan Kelas II Mataram. Penanganan dan pencegahan penularan virus covid-19 dilakukan dengan cara pembagian masker, hand sanitizer kepada seluruh pegawai.

Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Pelaksanaan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran tahun anggaran 2023 pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram berjalan dengan baik. Sesuai dokumen isian pelaksanaan anggaran (DIPA) awal dan kerangka acuan kerja output layanan sarana internal detail barang yang diadakan berjumlah 54 (lima puluh empat) unit antara lain; 45 (empat puluh lima) unit kursi besi; 6 (enam) unit lemari besi; 2 (dua) unit AC portable; 1 (satu) unit mesin pemotong rumput.

Pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan untuk klien pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram. Tujuan pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran adalah untuk menyelesaikan permasalahan terkait pelayanan terhadap klien pemasyarakatan dan untuk meningkatkan kenyamanan penerima layanan.

Balai pemasyarakatan kelas II Mataram mendorong agar Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu setiap tahun semakin meningkat kualitasnya diikuti juga dengan digitalisasi pada setiap prosesnya.

Realisasi kinerja tahun 2023

Menghitung realisasi kinerja jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran adalah dengan membagi jumlah target kinerja dengan realisasi kinerja dikali 100%.

Formula :

$$\text{Persentase capaian} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Target

B = Realisasi

Semakin tinggi angka persentase menunjukkan kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram semakin baik. Capaian pada Indikator ini adalah sebesar 100 %.

Tabel data realisasi indikator kinerja utama nomor 9

No	Indikator Kinerja Utama	Target (A)	Realisasi (B)	Persentase realisasi
1	Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	54 Unit	54 Unit	100%

diagram data realisasi indikator kinerja utama nomor 9



Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi kinerja realisasi kinerja jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran meningkat. Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram pada tahun 2023 berhasil mempertahankan capaian 100% dari tahun ke tahun. Tahun 2022 realisasi capaiannya sebesar 100% dan pada tahun 2023 tetap sebesar 100 %.

Tabel data perbandingan capaian indikator kinerja utama nomor 9

Indikator Kinerja Utama	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	22 Unit	22 Unit	100%	54 Unit	54 Unit	100%

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam renstra satuan kerja 2020-2024

Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran tidak dapat dibandingkan dengan dengan target jangka menengah dalam rencana strategis satuan kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram tahun 2020-2024, karena dalam target jangka menengah dalam rencana strategis satuan kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram 2020-2024 tidak terdapat indikator kinerja utama Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran mengingat kebijakan belanja modal pada satuan kerja dibawah unit Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sangat bergantung pada ada tidaknya alokasi dana atau pagu belanja modal pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tabel data perbandingan realisasi indikator kinerja utama nomor 9 dengan target dalam renstra satker

INDIKATOR KINERJA UTAMA/KEGIATAN	TARGET TAHUN			
	2021	2023	2023	2024
Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	-	-	-	-

Penyebab keberhasilan

Kegiatan pengelolaan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram tahun

anggaran 2023 dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan e-purchasing melalui aplikasi e-catalog LPSE.

Dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) pemerintah melalui Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Beberapa detail barang yang menjadi rencana pengadaan pada tahun anggaran 2023 harus mengalami revisi karena tidak sesuai dengan syarat penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan dokumen RKBMN.

Tabel pengadaan barang tahun anggaran 2023

NO	JENIS BARANG	AWAL	REVISI	KETERANGAN
1	Kursi Besi/metal	45 UNIT	45 UNIT	Sudah terlaksana
2	AC Portable	2 UNIT	2 UNIT	Sudah terlaksana
3	Lemari Besi	6 UNIT	4 UNIT	Sudah terlaksana, hanya 4 unit saja sesuai RKBMN
4	Mesin Pemotong Rumput	1 UNIT	0 UNIT	Tidak memenuhi syarat PDN.
5	AC Split	0 UNIT	2 UNIT	Sudah terlaksana
6	Bangku panjang besi/metal	0 UNIT	1 UNIT	Sudah terlaksana
JUMLAH		54 UNIT	54 UNIT	REALISASI 100%

Keberhasilan dalam realisasi target kinerja jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran pada Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram juga didukung oleh proses digitalisasi pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme e-purchasing LPSE yang dilakukan oleh Pejabat

Pengadaan Barang dan Jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen. Mekanisme ini dipilih untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan APBN.

Jumlah Gedung dan Bangunan

Pelaksanaan kinerja jumlah gedung dan bangunan berupa rehabilitasi instalasi jaringan listrik pada Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram berjalan dengan baik.

Pelaksanaan rehabilitasi instalasi jaringan listrik berawal dari hasil menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM melalui surat nomor : PAS-PR.02.02-57 tanggal 8 September 2021 perihal semua UPT. Pemasarakatan untuk melakukan Pengecekan/pemeriksaan dan evaluasi terhadap jaringan listrik dan hydrant di masing-masing Kantor Unit Pelaksana Teknis dengan melibatkan pihak ketiga yang berkompeten di bidang instalasi kelistrikan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan jaringan listrik di Kantor Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram ditemukan bahwa jaringan kelistrikan banyak mengalami kerusakan karena Usia Gedung yang sudah di atas 10 tahun dan perlu dilakukan rehabilitasi demi keamanan bekerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari. Hal tersebut didukung juga oleh hasil analisa kerusakan jaringan listrik.

Balai pemasarakatan kelas II Mataram mendorong agar Pelaksanaan rehabilitasi instalasi jaringan listrik pada Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram terlaksana dengan baik dan kualitas hasil pekerjaan yang baik.

Realisasi kinerja tahun 2023

Menghitung realisasi kinerja jumlah gedung dan bangunan adalah dengan membagi jumlah target kinerja dengan realisasi kinerja dikali 100%.

Formula :

$$\text{Persentase capaian} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Target

B = Realisasi

Semakin tinggi angka persentase menunjukkan kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram semakin baik. Capaian pada Indikator ini adalah sebesar 100 %.

Tabel data realisasi indikator kinerja utama nomor 10

No	Indikator Kinerja Utama	Target (A)	Realisasi (B)	Persentase realisasi
1	Jumlah gedung dan bangunan	1 Unit	1 Unit	100%

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Realisasi kinerja jumlah gedung dan bangunan tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 karena tidak terdapat target indikator kinerja jumlah gedung dan bangunan pada Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram pada tahun 2022.

Tabel data perbandingan capaian indikator kinerja utama nomor 9

Indikator Kinerja Utama	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah gedung dan bangunan	0 Unit	0 Unit	0	1 Unit	1 Unit	100%

diagram data realisasi indikator kinerja utama nomor 10



Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam renstra satuan kerja 2020-2024

Realisasi kinerja jumlah gedung dan bangunan tidak dapat dibandingkan dengan dengan target jangka menengah dalam rencana strategis satuan kerja Balai Pemasayatakan Kelas II Mataram tahun 2020-2024, karena dalam target jangka menengah pada rencana strategis satuan kerja Balai Pemasayarakatan Kelas II Mataram 2020-2024 tidak terdapat indikator kinerja utama Jumlah gedung dan bangunan mengingat kebijakan belanja modal pada satuan kerja dibawah unit Direktorat Jenderal Pemasayarakatan sangat bergantung pada ada tidaknya alokasi dana atau pagu belanja modal pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tabel data perbandingan realisasi indikator kinerja utama nomor 10 dengan target dalam renstra satker

INDIKATOR KINERJA UTAMA/KEGIATAN	TARGET TAHUN			
	2021	2023	2023	2024
Jumlah gedung dan bangunan	-	-	-	-

Penyebab keberhasilan

Kegiatan pengadaan rehabilitasi jaringan instalasi listrik gedung dan bangunan Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram tahun anggaran 2023 dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan langsung. Pekerjaan fisiknya dilaksanakan dalam kurun waktu 6 (enam) minggu selama bulan maret hingga April tahun 2023.

Kegiatan pengadaan rehabilitasi jaringan instalasi listrik gedung dan bangunan Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram dikerjakan oleh pihak ketiga yang kompeten dibidangnya dan sudah berpengalaman sehingga hasil pekerjaan dapat dijamin kualitasnya. Kegiatan berupa penggantian seluruh kabel lama, rehabilitasi jaringan listrik dan stop kontak semua ruangan kantor, penggantian bola lampu yang rusak serta penggantian panel-panel listrik.

Kegiatan rehabilitasi jaringan instalasi listrik gedung dan bangunan Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram selesai dan diserahkan dengan tepat waktu dan hasil yang baik.

CAPAIAN REALISASI ANGGARAN

Capaian realisasi anggaran pada Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram tahun 2023 terealisasi sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah ditetapkan. Capaian realisasi anggaran tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

Realisasi Anggaran

Berdasarkan dokumen daftar isian pelaksanaan anggaran Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-013.05.2.407607/2023 tanggal 17 November 2021 pagu awal yang dialokasikan sebesar Rp. 4.921.757.000,- (Empat milyar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) terbagi dalam 2 (dua) program yaitu program penegakan dan pelayanan pukum (013.05.BF) dengan nilai pagu anggaran Rp. 704.477.000 (Tujuh ratus empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan Program

Dukungan Manajemen (013.05.WA) dengan nilai pagu anggaran Rp. 4.217.280.000 (Empat milyar dua ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Selama tahun anggaran 2023 telah dilakukan 6 (enam) revisi dipa, diantaranya 4 (empat) kali revisi penyesuaian rencana penarikan dana halaman III DIPA, 1(satu) Kali kali revisi penambahan pagu belanja pegawai dan terakhir 1 (satu) kali revisi pemutakhiran data.

Data pagu anggaran semula dan pagu anggaran setelah revisi pada akhir tahun anggaran 2023 adalah;

Tabel data pagu awal dan pagu akhir per program

NO	PROGRAM	PAGU SEMULA (AWAL)	PAGU REVISI (AKHIR)
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (013.05.BF)	Rp 704.477.000	Rp 704.477.000
2	Program Dukungan Manajemen (013.05.WA)	Rp 4.121.083.000	Rp 4.431.883.000

Tabel data pagu awal dan pagu akhir per jenis belanja

NO	JENIS BELANJA	PAGU SEMULA (AWAL)	PAGU REVISI (AKHIR)
1	Belanja Pegawai	Rp 3.236.475.000	Rp 3.601.475.000
2	Belanja Barang	Rp 1.405.885.000	Rp 1.405.885.000
3	Belanja Modal	Rp. 279.397.000	Rp 279.397.000

Setelah dilakukan beberapa kali revisi anggaran total pagu anggaran pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram tahun 2023 bertambah dan menjadi Rp. 5.286.757.000 (Lima milyar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu). Adanya penambahan pada anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 365.000.000 (Tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).

Realisasi anggaran pada satuan kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram sampai dengan tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel data realisasi anggaran per program

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (013.05.BF)	Rp 704.477.000	Rp 704.468.500	100%
2	Program Dukungan Manajemen (013.05.WA)	Rp 4.582.280.000	Rp 4.529.327.649	98,84%

Tabel data realisasi anggaran per jenis belanja

NO	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI
1	Belanja Pegawai	Rp 3.601.475.000	Rp 3.560.767.199	98.87%
2	Belanja Barang	Rp 1.405.885.000	Rp 1.398.328.950	99.46%
3	Belanja Modal	Rp. 279.397.000	Rp 274.700.000	98.32%

Realisasi anggaran pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 5.233.796.149 (Lima milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) dalam persentase yaitu 99%. Sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp. 52.960.851 (Lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) yang Sebagian besar merupakan sisa dari belanja gaji pegawai yang tidak terealisasi optimal.

Perbandingan realisasi anggaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Realisasi anggaran tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2022 mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel data perbandingan realisasi anggaran YoY

Tahun 2022			Tahun 2023		
Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Rp. 5.838.410.000	Rp. 5.818.514.743	99,66%	Rp. 5.286.757.000	Rp. 5.233.796.149	99,00%

diagram perbandingan persentase realisasi anggaran



Menurunnya persentase penyerapan anggaran pada tahun 2023 terjadi karena tidak optimalnya penyerapan pada anggaran belanja pegawai. Beberapa pegawai mengalami mutasi sehingga menyebabkan anggaran tersisa. Namun dirasa hal tersebut tidak terlalu signifikan karena anggaran yang tersisa tidak lebih dari 1 % (Satu persen).

CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Kinerja anggaran merupakan capaian kinerja atas segala yang berkaitan dengan kegiatan keuangan pada suatu institusi pada periode tertentu. Capaian kinerja anggaran pada Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram tahun anggaran 2023 tercapai dengan sangat baik. Capaian kinerja anggaran pada satuan kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram tahun anggaran 2023 yang diambil dari aplikasi SMART KEMENKEU (<https://smart.kemenkeu.go.id>) dan penilaian IKPA satker <https://spanint.kemenkeu.go.id>;

Capaian kinerja anggaran

Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) dalam SE-8/MK.1/2020 menggunakan dua alat yakni capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Sistem Monitoring Kinerja Terpadu (SMART). IKPA dan SMART digunakan untuk mengukur kualitas dari kinerja penganggaran pada tiap tahap kegiatan antara lain perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pada aplikasi SMART dan IKPA dapat diakses setiap awal bulan berkenaan setelah selesai menginput hasil capaian realisasi output (CRO) melalui aplikasi SAKTI Kemenkeu. Berikut ini merupakan data Capaian Kinerja Anggaran pada satuan kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram tahun anggaran 2023;

Gb. *Screenshot* aplikasi smart Balai Pemasarakatan Mataram TA.2023



Nilai Penyerapan 99, Konsistensi sebesar 99,75, Capaian Realisasi Output sebesar 100, Efisiensi sebesar 20 dan Nilai Efisiensi sebesar 100. Nilai Akhir 99,86 (Sangat Baik).

Gb. Screenshot aplikasi IKPA Balai Pemasyaraktan Mataram TA.2023

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN MATARAM

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sebagai Dengan: DEKREKES

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Subkegiatan	Uraian Subkegiatan	Kategori	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Kategori Baik/Buruk	Nilai Akhir (Bila Total/Kategori Baik)
						Realisasi DPA	Detail Pelaksanaan DPA	Penyerapan Anggaran	Saluran Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengeluaran UP dan TUP	Dipertanggungjawabkan SPM				
1	030	010	407007	BALAI PEMASYARAKATAN MATARAM	Nilai	100,00	99,75	100,00	0,00	0,00	97,50	100,00	100,00	78,50	80%	98,20
					Solusi	10	10	20	0	0	10	5	25			
					Nilai Akhir	10,00	9,99	20,00	0,00	0,00	9,75	5,00	25,00			
					Nilai Akhir	94,01				99,20			100,00			

Nilai aspek kualitas perencanaan anggaran 94,01, nilai aspek kualitas pelaksanaan anggaran 99,20 dan nilai aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran 100 dengan nilai akhir 98,20.

Capaian kinerja anggaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Capaian kinerja anggaran tahun 2023 jika dibandingkan dengan nilai capaian kinerja anggaran tahun 2022 meningkat. Hal tersebut karena terdapat kenaikan pada nilai SMART Balai Pemasyaraktan Kelas II Mataram tahun 2023;

Tabel perbandingan nilai SMART dan IKPA tahun 2022 dan 2023

Alat/tools	Tahun 2022	Tahun 2023
SMART	99,57	99,86
IKPA	99,05	98,20

Capaian nilai SMART yang tinggi diperoleh dari meningkatnya nilai efisiensi yang mencapai nilai 20 pada tahun anggaran 2023.

CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Capaian Kinerja lainnya pada satuan kerja Balai Pemasaryakatan Kelas II Mataram tahun anggaran 2023 dipantau dari aplikasi e-monev bappenas <https://e-monev.bappenas.go.id/> dan aplikasi e-performance kemenkumham <https://e-performance.kemenkumham.go.id/>.

3.4.1 Capaian kinerja lainnya

Penginputan data pada aplikasi e-monev bappenas dilakukan setiap awal bulan berkenaan dan dilaporkan sebelum tanggal 10 bulan berkenaan. Penginputan data pada aplikasi ini telah dilaksanakan dengan rutin dan tepat waktu dan berikut merupakan *screenshot* aplikasi e-monev bappenas.

Gb. *Screenshot* aplikasi emonev-bappenas satker Balai Pemasaryakatan Mataram (407607) TA.2023



Penginputan data pada aplikasi e-performance kemenkumham dilakukan setiap awal bulan berkenaan dan dilaporkan sebelum tanggal 10 bulan berkenaan. Penginputan data pada aplikasi ini telah dilaksanakan dengan rutin dan tepat waktu dan berikut merupakan *screenshot* aplikasi e-performance kemenkumham.

Gb. Screenshot aplikasi e-performance satker Balai Pemasarakan Mataram (407607) TA.2023

Home | Dashboard | Input Data | Perencanaan | Realisasi | Laporan | User Password | Akur

E-PERFORMANCE

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Hi Balai Pemasarakan Mataram, Selamat Datang di E-PERFORMANCE! Login | Senin, 30 Maret 2023 | 06:00:56 WIB

Home

TAHUN: 2023 | Tabelas Pengukuran Kinerja | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA |

ID	NAMA UNIT	KATEGORI KINERJA	TITIK SASARAN	PERIODE					Total	TITIK SASARAN	MELAKUKI TINGKAT I-IPM	JUMLAH INDIKATOR
				01-03	04-06	07-09	10-12	01-03				
1	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA	TKI										
		TKI										
		TKI										
		TKI										
2	DIREKTORAT JENDERAL	TKI	3								3	
		TKI	3								3	
		TKI	3								3	
3	DINAMIS	TKI		1				1			2	
		TKI										
		TKI										
		TKI										

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram telah menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) tahun 2023. Laporan ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram dilihat dari capaian indikator Kinerja secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (public accountability).

Di tahun 2023 status pandemi Covid-19 telah dicabut Pemerintah. Hal tersebut memberikan dampak langsung pada Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram karena Pembatasan Interaksi Sosial Masyarakat yang sebelumnya diterapkan telah dihapuskan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan Mataram dapat berjalan dengan lebih lancar

Secara umum, pencapaian kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram tahun 2023 sudah cukup maksimal. Pada tahun 2023 Balai Pemasarkatan meraih predikat satuan kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN-RB. Hal ini tidak lepas penilaian kinerja dan peningkatan integritas sumber daya manusia dan peran serta seluruh elemen organisasi Balai Pemasarakatan yang terlibat dalam usaha meraih predikat tersebut.

Pada Semester Kedua tahun 2023 dengan beberapa Strategi percepatan pada akhirnya semua kegiatan dan target indikator kinerja utama (IKU) serta realisasi anggaran dapat tercapai secara maksimal. Semua capaian target Kinerja yang tercantum di Perjanjian Kinerja

dapat dicapai dengan hasil yang bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya meningkat. Hal itu tidak lain adalah kerja keras dan kerja sama dari Semua pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram sehari-hari.

Dokumentasi dan penyebaran berita terkait kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram tahun 2023 dapat dilihat dalam berita dan media sosial Bapas Mataram.

SARAN DAN TINDAK LANJUT

Saran-saran yang bernilai membangun sangat kami butuhkan dalam upaya untuk meningkatkan pencapaian target kinerja. Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram di tahun-tahun berikutnya. Saran dan Harapan kami demi terwujudnya peningkatan Kinerja Bapas Kelas II Mataram adalah sebagai berikut;

1. Bersama-sama menguatkan sinergi antara Balai Pemasarakatan, Divisi Pemasarakatan, serta stakholder lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasarakatan;
2. Meningkatkan kompetensi dan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan serta jumlah pegawai pelaksana pada Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram.
3. Dipenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasarakatan pada Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram.

Kepala Balai Pemasarakatan
Kelas II Mataram



Muhtaruddin
NIP 19704051994031001

LAMPIRAN

1. Dokumen Perjanjian Kinerja



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MATARAM
DENGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
NUSA TENGGARA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhtaruddin
Jabatan : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Romi Yudianto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 11 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat



Romi Yudianto
NIP. 197706261997031001

Pihak Pertama,
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II
Mataram



Muhtaruddin
NIP. 197004051994031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

**KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MATARAM DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
NUSA TENGGARA BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong Inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase klien Pemasarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	50%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	85

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemsarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
		2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	1 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	0 Unit
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0 Unit
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	54 Unit
		9. Jumlah Gedung/Bangunan	1 Unit

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 704.477.000,-
Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	Rp. 704.477.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.217.280.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat	Rp. 4.217.280.000,-

Mataram, 11 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat



Romi Yudianto
NIP. 197706261997031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Masyarakat Kelas II
Mataram



Miharuddin
NIP. 197004051994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MATARAM
DENGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
NUSA TENGGARA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhtaruddin
Jabatan : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Mataram, 11 Januari 2023

Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II
Mataram



DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2023

1. Pengumpulan data melalui *home visit* dan data perkembangan WBP dalam lapas untuk pembuatan penelitian Kemasyarakatan



2. Siang Tim Pengamat Pemasyarakatan dilaksanakan dua kali seminggu di Bapas maupun di Lapas/Rutan



3. Pendampingan Anak berkonflik dengan hukum dalam diversi dan semua tahapan peradilan Anak



4. Pembimbingan kemandirian dan pembimbingan kepribadian klien masyarakat



5. Pengawasan melalui kegiatan wajib lapor klien dan *home visit* klien masyarakat



6. Rekomendasi program pembinaan pada Lapas/Rutan/LPKA



7. Peningkatan Kompetensi pegawai dan Penilaian uji kompetensi pegawai



8. Pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara, pengusulan rehab rumah dinas, pelaksanaan penghapusan dan lelang BMN.



9. Koordinasi dan Kerjasama dengan stakeholder lainnya



10. Rapat evaluasi kinerja internal dan anggaran rutin serta rapat koordinasi dan evaluasi kantor wilayah.



11. Kegiatan rapat-rapat penyusunan Anggaran dan rencana kerja di Bapas Matara tahun 2024



12. Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi, internalisasi pegawai, serangkaian tahap penilaian TPI dan TPN serta studi tiru.



13. Inovasi antar klien Gratis sangat membantu klien Bapas Mataram



Inovasi layanan piket di hari sabtu



Inovasi aplikasi "Simbarajitu" yang sudah dapat didownload di playstore



14. Prestasi dan penghargaan Bapas Mataram sebagai satker predikat WBK



Penghargaan sebagai satker penyelenggara pelayanan HAM



Penghargaan satker Sedang dengan Nilai IKPA Tertinggi se-NTB



Berhasil pembentukan Gria Abhipraya Mandalika Mataram



Turut serta memberikan kontribusi kemajuan bidang Pendidikan kepada Mahasiswa studi lapangan Universitas Mataram.



15. Media Sosial Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram

Instagram : bapas mataram
Youtbe : bapas mataram
Twitter / X : bapas mataram
Facebook : Balai Pemasarakatan (Mataram)
Website : www.bapasmataram.kemenkumham.go.id

16. Penilaian IPK dan IKM

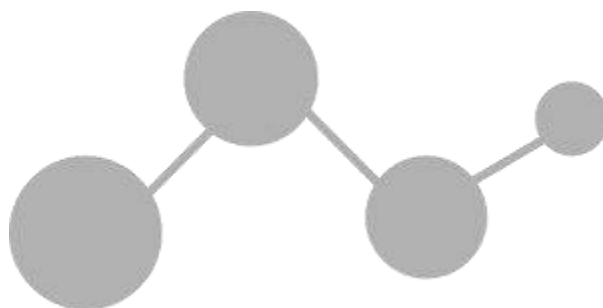
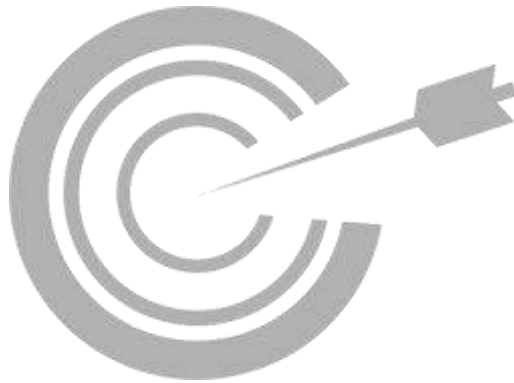
Gb. Screenshot IPK dan IKM Balai Pemasarakan Mataram TA.2023



Tabel data penilaian IPK dan IKM

Rekapitulasi Survei IPK IKM Bapas Mataram Tahun 2023					
No.	Bulan	Responden	IKM/SPKP	IPK/SPAK	Penilaian
1	Januari	51	16.77	16.72	Sangat Baik
2	Februari	49	16.70	16.30	Sangat Baik
3	Maret	45	17.03	16.92	Sangat Baik
4	April	48	16.87	16.77	Sangat Baik
5	Mei	50	16.74	16.50	Sangat Baik
6	Juni	53	16.87	16.80	Sangat Baik
7	Juli	53	16.96	16.98	Sangat Baik
8	Agustus	51	16.98	17.05	Sangat Baik
9	September	71	17.15	16.88	Sangat Baik
10	Oktober	71	16.86	16.75	Sangat Baik
11	November	72	17.02	16.92	Sangat Baik
12	Desember	71	16.83	16.91	Sangat Baik

**BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MATARAM
TAHUN 2023**



Motto Kerja : JITU (Bekerja Jujur, Bekerja Ikhlas, Bekerja Tuntas)